



Published every April, August and December

JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan dan Efektifitas Sistem

Ari Riswanto¹, Sri Rahayu Ningsih², Dewi Daryati³

¹STKIP PGRI Sukabumi, Sukabumi, Indonesia

²Disdikpora Kabupaten Bandung Barat, Indonesia

³Disdikpora Kabupaten Bandung Barat, Indonesia

Abstract. *Necessary strategic efforts in maintaining the wheels of business that is being run, one business that can be done is to maximize the internal control of the company. Control can be done by this company depends on the type of company, whether for service, commercial or manufacturing. The purpose of this study was to determine the extent of control internal role undertaken by the company in providing business loans to prospective clients effectively and in accordance with a predetermined system. The research methodology used is descriptive qualitative analysis that provides clear explanations in accordance with the empirical conditions that occur in the field. As for the location of the research in this study is one of the companies engaged in the provision of credit services, using interview techniques, observasi and processing of secondary data derived from the company. The conclusion of the research is that by using a good internal control system in each agency or fields at various levels of management will maximize the performance of the management, particularly in the areas of lending, loans provided are allowed to be provided effectively to customers who'm really needs. Recommendations from this study is specifically for the business unit where research was conducted in order to maximize the use of technology-based systems that have / computerization and provide training to the user / users of computerized systems so they can be used more leverage than it already obtained.*

Keywords: *Internal Control; Enterprise Lending; Effectiveness System.*

Abstrak. Upaya strategis yang diperlukan dalam menjaga roda bisnis yang sedang dijalankan, salah satu bisnis yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan pengendalian internal perusahaan. Pengendalian yang bisa dilakukan oleh perusahaan ini tergantung dari jenis perusahaan, baik untuk jasa, komersial maupun manufaktur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kontrol peran internal yang dilakukan oleh perusahaan dalam memberikan pinjaman usaha kepada calon nasabah secara efektif dan sesuai dengan sistem yang telah ditentukan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif yang memberikan penjelasan yang jelas sesuai dengan kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Sedangkan untuk lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam penyediaan layanan kredit, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan pengolahan data sekunder yang berasal dari perusahaan. Kesimpulan penelitian yaitu dengan menggunakan sistem pengendalian internal yang baik di setiap instansi atau bidang pada berbagai tingkat manajemen akan memaksimalkan kinerja manajemen, terutama di bidang pinjaman, pinjaman yang diberikan diberikan secara efektif kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan. Rekomendasi penelitian yaitu khusus untuk unit bisnis dimana penelitian dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan sistem berbasis teknologi yang memiliki / komputerisasi dan memberikan pelatihan kepada pengguna / pengguna sistem komputerisasi sehingga bisa dimanfaatkan lebih maksimal daripada yang sudah ada. diperoleh.

Kata Kunci: Pengendalian Internal; Pemberian Pinjaman Perusahaan; Sistem Efektivitas.

Corresponding author. Email: ¹ayahmazan@gmail.com, ²srahayu060@gmail.com, ³dewidaryati@gmail.com

How to cite this article. Ari Riswanto, Sri Rahayu Ningsih, D. D. (2016). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 4(3), 1169–1176. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4670>

History of article. Received: September 2016, Revision: November 2016, Published: December 2016

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v4i3.4670

Copyright©2016. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin tajam perusahaan mengubah strategi pemasarannya, dengan meletakkan kepuasan konsumen sebagai prioritas utama dalam mengarahkan kegiatan bisnis. Perusahaan-perusahaan yang mampu menghasilkan produk atau jasa yang bermutu tinggi dengan harga yang rendah untuk dapat bertahan dipasar. Selain itu, perkembangan ekonomi yang telah memasuki era pasar bebas dan Indonesia merupakan Negara yang dituntut mampu menghadapi kemajuan-kemajuan baik ilmu pengetahuan maupun teknologi. Di era pasar bebas, memungkinkan setiap Negara untuk melakukan penjualan kenegara lain dan melakukan hubungan yang erat dengan berbagai Negara.

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Benaroch, Chernobai, & Goldstein, 2012). Definisi pengendalian intern tersebut menekankan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, hal ini berlaku baik bagi perusahaan yang mengolah informasinya secara manual dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer.

Namun tidak jarang sistem pengendalian intern sering disamakan dengan unit organisasi yang disebut dengan satuan pengawas intern dalam perusahaan. Untuk memperbaiki sistem pengendalian intern manajemen puncak sering kali menempuh cara dengan membentuk unit organisasi yang disebut satuan pengawas intern (Jennings, Pany, & Reckers, 2008). Unit organisasi sebenarnya unsursistem pengendalian yang bersifat deduktif, yang fungsinya mengecek apakah unsur-unsur pengendalian yang lain bekerja dengan semestinya. Selain itu sistem pengendalian intern yang lemah akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya.

Menurut Undang-undang No. 7/1992 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (R. Indonesia, 1992, 1998)

Untuk memperlancar operasinya, bank mendirikan cabang didaerah-daerah dengan tujuan memberikan pelayanan jasa bank kepada masyarakat terutama pada golongan ekonomi lemah. Dengan adanya pemberian kredit tersebut dapat menguntungkan semua pihak diantaranya pemerintah yaitu tercapainya salah satu tujuan pembangunan nasional dalam bentuk kesejahteraan umum. Bagi bank, dengan adanya cabang tersebut akan memperbesar dan memperluas pemberian kredit khususnya kepada pedagang kecil. Bagi masyarakat, dengan adanya cabang bank tersebut akan lebih mudah mendapatkan pelayanan kredit.

KAJIAN LITERATUR

Pengendalian Intern

Dalam perusahaan yang berskala kecil pimpinan dapat terlibat langsung dalam semua aktivitas perusahaan, tetapi apabila perusahaan tersebut semakin berkembang dimana pimpinan mempunyai kemampuan terbatas untuk mengawasi secara langsung seluruh aktivitas perusahaan, maka diperlukan suatu alat yang dapat membantu pimpinan dalam melaksanakan fungsinya tersebut. Salah satu alat bantu pimpinan tersebut adalah suatu pengendalian intern yang dapat memperlihatkan kondisi baik pelaporan keuangan ataupun kondisi perusahaan yang sebenarnya (Skaife, Veenman, & Wangerin, 2013).

Pengendalian menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik adalah sebagai berikut :“Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perusahaan tersebut.”(I. A. Indonesia, 2001)

Struktur Pengendalian Intern

Pada prakteknya terdapat dua pengertian dalam mengartikan internal control ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang mengartikan

pengawasan internal dan ada juga yang mengartikan pengendalian intern. Maka untuk pembahasan selanjutnya penulis menggunakan istilah pengendalian intern.

Dengan berkembangnya suatu perusahaan maka masalah yang dihadapi suatu pimpinan juga semakin kompleks dan semakin luas. Konsekuensi dari perkembangan tersebut maka pengertian *internal control* pun mengalami perkembangan ke arah yang lebih luas lagi yang dikenal dengan struktur pengendalian intern, dimana dalam struktur pengendalian intern tercakup juga lingkungan perusahaan, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian, sehingga dengan begitu laporan pengendalian internal dapat melengkapi kondisi laporan yang lainnya (Dowdell, Herda, & Notbohm, 2014)

Di dalam Standar Profesional Akuntan Publik disebutkan mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut :“Struktur pengendalian intern satuan usaha terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan (assurance) memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan dicapai”. (I. A. Indonesia, 2001)

Adapun definisi struktur pengendalian intern yang dikemukakan oleh George H. Bodnar, yang telah diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf, dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut : “Struktur pengendalian intern perusahaan terdiri dari kebijakan-kebijakan prosedur-prosedur yang menyediakan jaminan yang memadai, bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai.” (Bodnar, George H., 2000)

Tujuan Pengendalian Intern

Tujuan-tujuan dari struktur pengendalian intern sebagai berikut : (1) Menjaga kekayaan dan catatan akuntansi (2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi (3) Mendorong efisiensi (4) Mendorong dipatuhinya kekayaan manajemen (Mulyadi, 2014)

Konsep Kredit

Pengertian Kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan akan

kebenaran dalam praktek sehari – hari. “Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati “.

Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang – Undang Pokok Perbankan yang menyatakan bahwa kriteria adalah penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan (R. Indonesia, 1992)

Dalam praktek sehari – hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit (dana bank) yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata.

Prinsip Kredit

Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank / lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 6 C yaitu : (1) *Character* (kepribadian / Watak) *Character* adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga. (2) *Capacity* (kemampuan) *Capacity* adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada

waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati (Francisco, Sánchez, & Lechuga, 2016) (3) *Capital* (modal) *Capital* adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank. (4) *Collateral* (jaminan) *Collateral* adalah barang – barang yang diserahkan pada bank oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko (Xu & Zhou, 2016) (5) *Condition of Economic* (kondisi ekonomi) *Condition of Economic* adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit (6) *Constrain* (batasan atau hambatan) Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha di suatu tempat.(Akhigbe & McNulty, 2011)

Disamping formula 6 C di atas, masih ada prinsip kredit yang disebut 4 P, yaitu : (1) *Personality* *Personality* yaitu penilaian bank tentang kepribadian peminjam seperti riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarga (istri / anak), social standing (pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat tentang diri si peminjam dan sebagainya). (2) *Purpose*, Bank dalam menilai si peminjam mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit, dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit bank bersangkutan (Francisco et al., 2016) (3) *Payment*, Untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu jumlahnya. (4) *Prospect*, *Prospect* yaitu harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan – perkembangan keadaan ekonomi atau usaha perdagangan sektor usaha

debitur, kekuatan keuangan perusahaan yang dilihat dari *earning power* (kekuatan pendapatan / keuntungan) di masa lalu dan perkiraan masa akan datang.

Jenis Kredit

Untuk membedakan kredit menurut faktor – faktor dan unsur – unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka perbedaan kredit dapat dibedakan atas dasar : (1) Sifat penggunaan kredit untuk kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi atau uang akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu digunakan untuk kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha – usaha produksi, perdagangan maupun investasi. (2) Keperluan kredit yaitu Kredit produksi / eksploitasi, Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan kuantitas atau mutu hasil produksi. Selanjutnya Kredit Perdagangan , Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan *utility of place* suatu barang, barang – barang yang diperdagangkan ini juga diperlukan bagi industri. Selain itu Kredit Investasi, Kredit yang diberikan kepada para pengusaha untuk investasi, berarti untuk penambahan modal dan kredit bukan untuk keperluan perbaikan ataupun penambahan barang modal atau fasilitas – fasilitas yang erat hubungannya dengan itu. Misalnya untuk membangun pabrik, membeli / mengganti mesin – mesin dan sebagainya. (3) Kredit menurut cara pemakaian terdiri dari Kredit rekening Koran bebas, Debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran kepadanya diberikan blangko cheque dan rekening koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang diberikan, debitur bebas melakukan penarikan selama kredit berjalan. Selanjutnya Kredit rekening Koran terbatas, Sistem ini adanya perbatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya, seperti pemberian kredit dengan uang giral dan perubahannya

menjadi uang chartal dilakukan berangsur – angsur. Seperti Kredit rekening Koran *aflopend*, Penarikan kredit dilakukan dalam arti maksimum kredit pada waktu penarikan pertamalah sepeuhnya dipergunakan oleh nasabah. *Revolving credit*, Sistem penarikan kredit sama dengan cara rekening Koran bebas dengan masa penggunaan satu tahun, akan tetapi cara pemakaiannya berbeda. *Term Loans*, dalam sistem ini penggunaan dan pemakaian kredit sangat fleksibel artinya nasabah bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja dan bank tidak mau tentang hal itu. (4) Kredit menurut Jaminan Kredit ini pada umumnya ada dua yaitu *Unsecured Loans* (kredit tanpa jaminan) sering juga disebut kredit blangko dan *Secured Loans*, Jenis inilah yang digunakan oleh kebanyakan bank di Indonesia yaitu memberikan kredit jaminan. Jaminan kredit dapat berupa tanah, rumah, pabrik dan atau mesin – mesin pabrik, perusahaan serta surat berharga.

Jangka Waktu Kredit

Perbedaan jangka waktu kredit menurut peraturan Bank Indonesia yaitu Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu selama – lamanya satu tahun. Jadi pemakaiannya tidak melebihi satu tahun. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun dan Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

Jenis dan Fungsi Kredit

Tujuan kredit mencakup scope yang luas. Fungsi pokok yang saling berkaitan dari kredit adalah yaitu *Profitability*, *Profitability* ini bertujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga. *Safety*, *Safety* adalah keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar – benar terjamin sehingga *profitability* dapat benar – benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

METODOLOGI PENELITIAN

Perusahaan dapat memberikan kredit usaha secara efektif dengan sistem yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan faktadan juga jurnal sebagai litelatur dan melakukukan observasi serta analisis pada unit perusahaan perbankan “BPR Sukabumi” dan dilakukan kajian secara kualitatif. Penelitian Kualitatif secara khusus penting dalam ilmu perilaku dimana tujuannya adalah untuk menemukan mendasari motif perilaku manusia tersebut. Melalui penelitian tersebut kita dapat menganalisis berbagai faktor yang memotivasi orang untuk berperilaku dalam cara tertentu atau yang membuat orang-orang seperti atau tidak suka hal tertentu. Ini dapat dinyatakan, bagaimanapun, bahwa untuk menerapkan penelitian kualitatif. (Kothari, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekarang telah dikenal oleh nasabah Sukabumi dan sekitarnya dengan *call name* ”BPR Sukabumi” pada dekade tahun 1968 lahir sebuah lembaga keuangan yang diberi nama BKPD (Bank Karya Produksi Desa) dengan surat keputusan Gubernur Jawa Barat No. 79/BV/PEM/SK/68 pada tanggal 19 Maret 1968 yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, lembaga keuangan diatas dibentuk dalam rangka membantu pemerintahan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian nasabah pedesaan pada saat itu.

Sejalan dengan perkembangannya serta atas tuntutan peraturan Pemerintah khususnya bidang perbankan, maka pada tahun 1992 terbit Peraturan Pemerintah nomor 71 dan keputusan Menteri Keuangan nomor 184 s/d 196/KM/17/1998, dari BKPD sejumlah sisa 13 dari saat awal berdiri berjumlah 21 tersebut terjadi perubahan nama menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan badan hukum Perusahaan Daerah (PD).

Bahwa sesuai dengan visi dan misi PD BPR Sukabumi yang merupakan pernyataan sikap dan komitmen perusahaan yang tertuang dalam konsep rencana kerja jangka panjang

dan pendek sehingga terdokumentasi dalam sebuah rencana *corporate* dan *bussines plan* perusahaan, BPR Sukabumi menitik beratkan kepada pengembangan pengelolaan usaha bank yang sehat dan profesional, selanjutnya dengan strategi dan atas kesepakatan para *stake holders*, maka strategi pengembangan usaha fokus kepada terselenggaranya "*Good Corporate Governance*".

PD BPR Sukabumi siap menghadapi persaingan baru dari lembaga keuangan sejenis dan bank umum yaitu dengan pembenahan manajemen dan peningkatan SDM yang terus dilakukan, sehingga telah siap bersaing secara profesional untuk meningkatkan pelayanan maksimal kepada nasabah. Kesiapan bersaing juga akan ditunjang dengan konsolidasi sesama pengurus, sebab konsolidasi merupakan penguatan keseluruhan manajemen BPR untuk melakukan upaya penguatan organinasasi. Kesadaran yang kuat itu tumbuh karena BPR menyadari jika persaingan bukannya semakin mudah tetapi justru semakin sulit.

PD BPR Sukabumi juga memiliki bisnis inti yang pasti, terukur dan terarah. Strategi bisnis serta visi dan misi yang jelas maupun perencanaan perusahaan yang didamis sesuai perkembangan perekonomian. Pembenahan manajemen serta peningkatan SDM yang dimiliki PD BPR Sukabumi seperti Pelatihan *Excellence Service Quality Improvement* (Pelatihan Peningkatan Pelayanan Prima) bagi karyawan dan karyawatnya yang diharapkan akan menjadi prioritas utama termasuk pembinaan manajemen dan SDM bagi 13 cabang yang dimiliki PD BPR Sukabumi.

Saat ini total aset yang dimiliki PD BPR, semuanya berjumlah sekitar Rp 125 miliar lebih. Jumlah itu berasal dari APBD, laba bersih PD BPR dan dominan suntikan dari luar. Adapun untuk jumlah nasabah dan peminjam Deden mengaku jika peminjam dari kalangan PNS ataupun pihak swasta, jumlahnya berimbang. Saat ini PD BPR Sukabumi memiliki 13 Kantor Cabang yaitu : Sukaraja, Baros, Cisaat, Cibadak, Cicurug, Cisolok, Sukaraja, Nyalindung, Sagaranten,

Jampangkulon, Kalapanunggal, Cikembar dan Parungkuda.

Terkait dengan pengendalian intern, salah satu pengendalian yang dilakukan oleh BPR Sukabumi adalah Pengendalian Intern Piutang, Prosedur pencatatan penambahan piutang merupakan salah satu prosedur dalam sistem akuntansi penjualan. Dalam prosedur ini dicatat penambahan piutang yang didebitkan kedalam rekening penjualan barang dagangan, bila terjadi penjualan barang tidak tunai atau kedalam rekening kas/bank bila terjadi pemberian pinjaman kepada pelanggan.

Pengendalian Piutang meliputi analisa, penelaahan dan penelitian yang diharuskan terhadap kebijaksanaan, prosedur dan pelaksanaan yang sesungguhnya untuk mencapai sisa hasil usaha yang direncanakan. Dengan demikian Piutang harus dikendalikan agar pemberian Piutang sesuai dengan tujuan Piutang, kesanggupan mengembalikan Piutang sehingga pemberian Piutang tepat sasaran. Dalam pengendalian intern Piutang syarat-syarat pemberian Piutang memegang peranan penting dalam pemberian Piutang.

Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan penambahan piutang adalah Faktur penjualan kredit dan Buku pengeluaran kas

Faktur penjualan kredit digunakan oleh bagian piutang, mencatat penambahan piutang pada kartu piutang dan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat pengurangan kuantitas barang dagangan pada kartu persediaan serta oleh bagian jurnal untuk mencatat kedalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut :

Piutang barang dagangan	Rp.
XXX	
Penjualan	Rp.
XXX	

Bukti pengeluaran kas digunakan oleh bagian piutang untuk mencatat penambahan piutang pada kartu piutang dan oleh kasir untuk mencatat pengurangan kas pada buku kas kasir serta oleh bagian jurnal digunakan untuk mencatat kedalam jurnal umum sebagai berikut :

Piutang barang dagangan Rp.

XXX

Kas

Rp.

XXX

Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan penambahan piutang adalah kartu persediaan, kartu piutang, buku kas kasir dan jurnal umum. Prosedur pengurangan piutang merupakan salah satu prosedur dalam sistem penerimaan kas dan prosedur pencatatan piutang. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi pengurangan piutang adalah Bukti penerimaan kas dan Retur penjualan

Bukti penerimaan kas (kas masuk) yang diterima oleh bagian piutang dari bagian penagihan dicatat kedalam buku piutang sebelah kredit. Setelah bagian piutang mencatat kedalam buku piutang bukti kas masuk tersebut dicatat oleh bagian jurnal. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan pengurangan piutang adalah : Kartu piutang, Kas kasir dan Jurnal umum

Jika melihat pengendalian internal yang dilakukan oleh BPR Sukabumi telah dilaksanakan secara baik dan sesuai prosedur yang ditentukan, artinya BPR Sukabumi memiliki alur yang sangat jelas dalam mengendalikan secara internal unit-unit kerja yang berada di dalam perusahaannya.

Selanjutnya berbicara terkait dengan pemberian kredit yang diberikan oleh BPR Sukabumi. Seperti di jelaskan diawab bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh BPR Sukabumi adalah bergerak dibidang perkreditan, sesuai dengan tujuan dari BPR Sukabumi: membantu meningkatkan taraf hidup perkapita nasabah, mensejahterakan seluruh pengguna jasa PD BPR Sukabumi, menjadikan salah satu kebanggaan pemilik dalam kompensasi pendapatan asli daerah dan melayani nasabah.

Dengan mengutamakan pelayanan dan juga penegndalian intern perusahaan, maka BPR Sukabumi hingga saat ini merupakan BPR yang masih kuat dan dapat memaksimalkan fungsinya membangun Sukabumi lebih maju.

SIMPULAN

Sesuai dengan hasil pengkajian dalam hasil temuan maka ada yang dapat menjadi simpulan dari penelitian kali ini, yaitu: 1) Pengendalian Intern memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberian kredit usaha secara efektif (Yergin, Mercan, & Erol, 2015); 2) BPR Sukabumi membuktikan bahwa dengan hal pada lembaga usahanya, menyebabkan usahanya senantiasa berkembang dan dapat memaksimalkan efektifitas penggunaan sistem yang sudah ada; 3) Pemberian Kredit pada nasabah BPR Sukabumi dapat dilakukan lebih efektif sehingga BPR Sukabumi dapat meminimalisir resiko piutang tak tertagih yang masih ada di para nasabah (Mock, Sun, Srivastava, & Vasarhelyi, 2009).

Semakin bertambah modal, nasabah dan berkembangnya usaha, maka kegiatan usaha akan memiliki tantangan yang lebih berat, leh karena itu perlu kiranya seluruh personil da segenap karyawan BPR Sukabumi mempertahankan kesolidan dan prinsip “Kerja Bareng” guna menjadikan BPR Sukabumi manjadi BPR terbaik di Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhigbe, A., & McNulty, J. E. (2011). Journal of Economics and Business Bank monitoring , profit efficiency and the commercial lending business model. *Journal of Economics and Business*, 63(6), 531–551. <http://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2011.07.001>
- Benaroch, M., Chernobai, A., & Goldstein, J. (2012). International Journal of Accounting Information Systems An internal control perspective on the market value consequences of IT operational risk events. *International Journal of Accounting Information Systems*, 13(4), 357–381. <http://doi.org/10.1016/j.accinf.2012.03.001>

- Bodnar, George H., W. S. H. (2000). *Sistem Informasi Akuntansi*. (R. M. T. Amir Abadi Jusuf, Ed.) (6th ed.). Jakart: Salemba Empat.
- Dowdell, T. D., Herda, D. N., & Notbohm, M. A. (2014). Research in Accounting Regulation Do management reports on internal control over financial reporting improve financial reporting ? *RESEARCH IN ACCOUNTING REGULATION*, 1–6. <http://doi.org/10.1016/j.racreg.2014.02.011>
- Francisco, J., Sánchez, M., & Lechuga, G. P. (2016). Assessment of a credit scoring system for popular bank savings and credit. *Contaduría Y Administración*, 61(2), 391–417. <http://doi.org/10.1016/j.cya.2015.11.004>
- Indonesia, I. A. (2001). Standar Profesional Akuntan Publik. Jakart: Salemba Empat.
- Indonesia, R. (1992). Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Indonesia, R. (1998). UU No 10 Tahun 1998 Perubahan atas UU No 7/1992.
- Jennings, M. M., Pany, K., & Reckers, P. M. J. (2008). Advances in Accounting , incorporating Advances in International Accounting Internal control audits : Judges ’ perceptions of the credibility of the fi nancial reporting process and likely auditor liability. *International Journal of Cardiology*, 24(2), 182–190. <http://doi.org/10.1016/j.adiac.2008.08.006>
- Kothari, C. (2004). *Research methodology: methods and techniques*. New Age International.
- <http://doi.org/http://196.29.172.66:8080/jspui/bitstream/123456789/2574/1/Research%20Methodology.pdf>
- Mock, T. J., Sun, L., Srivastava, R. P., & Vasarhelyi, M. (2009). International Journal of Accounting Information Systems An evidential reasoning approach to Sarbanes-Oxley mandated internal control risk assessment. *International Journal of Accounting Information Systems*, 10(2), 65–78. <http://doi.org/10.1016/j.accinf.2008.10.003>
- Mulyadi. (2014). Auditing “Pemeriksaan Akuntansi.” Jakart: Salemba Empat.
- Skaife, H. A., Veenman, D., & Wangerin, D. (2013). Internal control over financial reporting and managerial rent extraction : Evidence from the profitability of insider trading \$. *Journal of Accounting and Economics*, 55(1), 91–110. <http://doi.org/10.1016/j.jacceco.2012.07.005>
- Xu, C., & Zhou, Z. (2016). The study of internal control and over-investment on corporate credit risk. *Procedia - Procedia Computer Science*, 91, 109–113. <http://doi.org/10.1016/j.procs.2016.07.047>
- Yergin, H., Mercan, M., & Erol, A. (2015). Assessment of Efficiency and Effectiveness of Micro Credit Application From Socio-Economic and Political Perspectives : The Case of Hakkari. *Procedia Economics and Finance*, 23(October 2014), 176–179. [http://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00405-0](http://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00405-0)